

DAMPAK DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN NONTARIF DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL : ANALISIS STRATEGI UNTUK PERDAGANGAN YANG BERKELANJUTAN

Muhammad Afta Alfarizi¹⁾, Feby Ardiansyah²⁾, Muhammad Amir Slamet Seno Try Nugraha³⁾, Rifky Eko Pratama⁴⁾, Zaky Rinekso Wahyunanto⁵⁾, Naufal khaadhi mufid⁶⁾, Abelakgwijangge⁷⁾

Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bengkulu

Email : aftaalfarizi@gmail.com, febyardiansyah242@gmail.com, masseno0987@gmail.com, rifkyekopratama95@gmail.com, Zakyrinekso@gmail.com, naufaljunior668@gmail.com, aregwijangge1@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan nontarif merujuk pada kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi atau mengatur perdagangan internasional tanpa menggunakan tarif (pajak impor). Kebijakan ini mencakup berbagai instrumen, seperti pembatasan kuota, standar teknis, sertifikasi keamanan, persyaratan kesehatan, regulasi lingkungan, serta prosedur administrasi yang kompleks. Tujuan utama penerapan kebijakan nontarif adalah melindungi industri dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan memastikan keamanan produk. Namun, kebijakan nontarif sering kali dianggap sebagai hambatan perdagangan karena dapat mengurangi akses pasar bagi eksportir, meningkatkan biaya perdagangan, dan memperlambat proses pengiriman barang. Dampaknya dapat berupa distorsi pasar, penurunan efisiensi alokasi sumber daya, dan ketegangan dalam hubungan dagang antarnegara. Studi tentang perdagangan nontarif penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini memengaruhi arus perdagangan global, dinamika pasar, serta strategi pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan internasional.

Kata kunci : *Perdagangan, Perdagangan NonTarif, Hambatan, Kebijakan.*

ABSTRACT

Non-tariff trade refers to policies or regulations implemented by a country to limit or regulate international trade without using tariffs (import taxes). This policy includes various instruments, such as quota restrictions, technical standards, safety certification, health requirements, environmental regulations, as well as complex administrative procedures. The main objective of implementing non-tariff policies is to protect domestic industry, safeguard public health, protect the environment, and ensure product safety. However, non-tariff policies are often considered a trade barrier because they can reduce market access for exporters, increase trade costs, and slow down the process of sending goods. The impact can be market distortion, reduced efficiency of resource allocation, and tensions in trade relations between countries. The study of non-tariff trade is important to understand how this policy influences global trade flows, market dynamics, and the strategies of business actors in facing international competition.

Keywords: *Trade, Non-Tariff Trade, Barriers, Policy.*

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 77
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdagangan nontarif mencakup semua kebijakan yang mengatur perdagangan internasional selain bea masuk atau tarif. Berbeda dengan tarif yang mudah diukur dengan persentase nilai barang, kebijakan nontarif lebih rumit karena melibatkan regulasi teknis, larangan, dan persyaratan khusus yang seringkali bersifat subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif.

Menurut UNCTAD, kebijakan nontarif adalah kebijakan selain tarif biasa (pajak atau cukai) yang berpotensi memengaruhi jumlah barang yang diperdagangkan, harga barang, atau bahkan keduanya secara bersamaan. Artinya, kebijakan ini dapat berdampak pada kuantitas dan nilai barang yang diperjualbelikan antar negara.

Hambatan Nontarif atau *Non-Tariff Measures* (NTMs) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan dari produk yang diperdagangkan. Meskipun tujuan utamanya adalah melindungi konsumen, kepatuhan terhadap NTMs dapat menimbulkan biaya bagi perusahaan, menurunkan daya saing produk, dan berpotensi menaikkan harga bagi konsumen. Oleh karena itu, kebijakan NTMs perlu dievaluasi dengan cermat untuk memastikan manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada dampak negatifnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif merupakan cara yang dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena atau situasi secara apa adanya, tanpa mengubah-ubah variabel yang ada. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan perdagangan nontarif, termasuk jenis-jenisnya, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Metode ini tepat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan fungsi kebijakan nontarif dalam konteks perdagangan global maupun lokal.

Tujuan Penelitian Deskriptif, Menjelaskan konsep dan bentuk-bentuk kebijakan nontarif, seperti kuota, standar teknis, regulasi kesehatan, dan lainnya. Menganalisis tujuan dari penerapan kebijakan nontarif, misalnya untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, atau melindungi lingkungan. Mengidentifikasi dampak kebijakan nontarif terhadap arus perdagangan internasional dan perekonomian suatu negara. Menggambarkan tren implementasi kebijakan nontarif di berbagai negara atau sektor tertentu.

Penelitian deskriptif dalam artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti: Laporan resmi: Data dari organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), dan IMF (International Monetary Fund), Literatur ilmiah: Artikel jurnal, buku, dan laporan riset terkait perdagangan nontarif, Data statistik: Informasi perdagangan dari lembaga statistik nasional atau internasional untuk mendukung analisis. Penelitian ini akan memanfaatkan studi literatur yang sistematis untuk merangkum informasi yang relevan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan nontarif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Itu Perdagangan Non Tarif ?

Perdagangan nontarif mengacu pada segala bentuk kebijakan yang mengatur perdagangan internasional selain bea masuk. Jika tarif mudah diukur melalui angka persen pada nilai barang, kebijakan nontarif lebih kompleks karena mencakup regulasi teknis, larangan, dan persyaratan tertentu yang sering kali bersifat subjektif.

Kebijakan non-tarif menurut UNCTAD adalah kebijakan yang selain ordinary tariff (pajak atau cukai) yang berpotensi membawa dampak ekonomi terhadap jumlah dari barang yang diperjual – belikan maupun harga dari barang yang di perjual – belikan ataupun keduanya disaat yang bersamaan, mempengaruhi jumlah atau harganya.

Hambatan Non-Tarif atau Non-tariff measures (NTMs) merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh negara untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan adalah produk yang

aman, sehat, dan ramah lingkungan. Serangkaian tindakan ini ditujukan untuk melindungi konsumen, namun untuk mematuhi aturan tindakan ini dapat memakan biaya bagi perusahaan, mengurangi daya saing produk serta meningkatkan harga yang mereka kenakan ke konsumen. Atas seluruh alasan ini, kebijakan NTM perlu dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan ini lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan.

Dampak Kebijakan Non Tarif

Penerapan kebijakan nontarif dalam perdagangan dapat menimbulkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif terhadap kinerja perdagangan.

Dampak Negatif:

Kebijakan nontarif berpotensi menurunkan permintaan produk di negara pengimpor. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama:

- **Standar produk yang tinggi:** Persyaratan kualitas dan standar teknis yang ketat dapat menyulitkan produk impor untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga mengurangi jumlah produk yang lolos dan tersedia di pasar.
- **Kenaikan biaya perdagangan bagi eksportir:** Untuk memenuhi standar dan regulasi yang diberlakukan oleh kebijakan nontarif, eksportir harus mengeluarkan biaya tambahan, misalnya untuk pengujian, sertifikasi, atau modifikasi produk. Biaya ini pada akhirnya dapat meningkatkan harga produk dan menurunkan daya saingnya di pasar impor.

Dampak Positif:

Di sisi lain, kebijakan nontarif juga dapat memberikan manfaat, terutama dalam konteks informasi pasar:

- **Pengurangan asimetri informasi:** Penetapan standar mutu yang jelas dan transparan dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi antara negara eksportir dan importir. Dengan adanya standar yang sama, importir memiliki informasi yang lebih pasti mengenai kualitas dan karakteristik produk yang diimpor, sehingga mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bratt (2014).

Penelitian ini juga menemukan indikasi perbedaan dampak kebijakan nontarif yang spesifik, seperti *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT), yang ditunjukkan oleh perbedaan tanda koefisien pada model estimasi. Ini mengindikasikan bahwa jenis kebijakan nontarif yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda pula pada kinerja perdagangan.

Dengan kata lain: Kebijakan nontarif ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia dapat menghambat perdagangan dengan meningkatkan biaya dan menurunkan permintaan. Di sisi lain, ia dapat meningkatkan kualitas produk dan mengurangi ketidakpastian di pasar. Efek spesifiknya juga dapat bervariasi tergantung jenis kebijakan nontarif yang diterapkan, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan pengaruh SPS dan TBT.

Tantangan yang Dihadapi

Menurut Salvatore (1997: 315), seiring penurunan tarif di berbagai negara melalui negosiasi perdagangan multilateral, justru terjadi peningkatan jumlah dan peran hambatan perdagangan nontarif. Hambatan nontarif adalah pembatasan terhadap masuknya produk yang bukan disebabkan oleh tarif impor, melainkan oleh larangan, penunjukan perusahaan tertentu sebagai satu-satunya pihak yang menangani pemasaran dan produksi barang tertentu.

Hambatan nontarif ada yang bersifat eksplisit (tertulis) dan implisit (tidak tertulis). Baik hambatan tarif maupun nontarif dianggap sebagai hambatan buatan, sebagai penyeimbang hambatan alamiah seperti jarak dan ketersediaan sumber daya alam (Halwani, 2002: 102). Salvatore (1997: 315) menyebutkan beberapa bentuk hambatan yang sering terjadi, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara "sukarela", dan tindakan anti-dumping.

Hambatan nontarif juga dapat berupa hambatan birokrasi, yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam menerapkan "tarif bayangan" (Shadow tariff) pada pengadaan sektor publik. Artinya, keputusan impor diambil hanya jika harga barang impor (X) lebih murah daripada

alternatif lokal. Dalam konteks lain, proteksi ini identik dengan prosedur operasional standar lembaga birokrasi (Halwani, 2002: 102).

Halwani (2002: 103) memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis hambatan nontarif, antara lain:

1. **Pemeriksaan Pabean (Customs Clearance):** Proses persetujuan oleh petugas pabean terhadap dokumen dan barang impor. Petugas dapat menghambat masuknya barang dengan mempersulit proses persetujuan dan kurangnya koordinasi.
2. **Penilaian Pabean (Customs Valuation):** Penilaian nilai barang impor oleh petugas bea cukai, yang terkadang tidak mempercayai harga yang tertera di faktur. Jika harga yang ditetapkan petugas (check price) lebih tinggi dari harga faktur, maka pajak yang dikenakan akan lebih besar.
3. **Klasifikasi Pabean (Customs Classification):** Pengelompokan barang impor ke dalam kategori tertentu. Hambatan ini dapat memunculkan interpretasi yang berbeda dan menempatkan barang pada klasifikasi yang lebih tinggi dari seharusnya, sehingga berpotensi meningkatkan tarif.
4. **Perizinan Impor (Import Licensing):** Pemberian izin khusus kepada importir tertentu. Meskipun jarang terjadi, praktik ini dapat menghambat persaingan yang sehat dan efisiensi.
5. **Regulasi Pengemasan dan Pelabelan (Packaging and Labelling Regulations):** Persyaratan terkait pengemasan dan pelabelan produk impor agar sesuai dengan standar negara pengimpor atau standar internasional.
6. **Pengendalian Devisa (Foreign Exchange Control):** Pengaturan lalu lintas devisa untuk transaksi impor dan ekspor.
7. **Formalitas Konsuler (Consular Formalities):** Persyaratan bagi importir untuk menunjukkan surat dari konsuler negara asal barang impor.

Solusi Untuk Menciptakan Perdagangan yang Lebih Adil dan Berkelanjutan

Untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan solusi yang mengatasi hambatan nontarif tanpa bergantung pada tarif atau bea impor yang tinggi. Berikut beberapa solusi yang dapat diimplementasikan:

1. **Peningkatan Standar Sosial dan Lingkungan:**
 - o **Standar Ketenagakerjaan:** Mendorong penerapan standar ketenagakerjaan internasional yang adil di semua negara, termasuk penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, serta penerapan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman.
 - o **Keberlanjutan Lingkungan:** Mendorong adopsi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, deforestasi, dan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
2. **Pengaturan Pelabelan dan Sertifikasi Produk:**
 - o Menerapkan sistem pelabelan dan sertifikasi internasional untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi standar tertentu terkait keberlanjutan, keadilan sosial, atau kualitas. Sertifikasi seperti Fair Trade atau organik dapat menjamin kepatuhan terhadap standar etika yang lebih tinggi.
 - o Memudahkan identifikasi produk bersertifikasi akan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada gilirannya akan mendorong produsen untuk meningkatkan praktik produksi mereka.
3. **Transparansi Regulasi dan Kebijakan:**
 - o Mengurangi hambatan nontarif yang timbul dari regulasi yang rumit dan kurang transparan. Meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan dan peraturan impor-ekspor akan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih setara dan mempermudah akses pasar, terutama bagi negara berkembang.
 - o Memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang untuk memenuhi standar regulasi juga penting agar mereka tidak terbebani oleh persyaratan yang sulit dipenuhi.
4. **Fasilitasi Akses untuk UKM:**

- Mengurangi hambatan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara berkembang untuk mengakses pasar global, misalnya melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, atau pembiayaan mikro untuk membantu mereka memenuhi standar internasional.
 - Kebijakan yang memperkuat jaringan perdagangan regional dan menciptakan kesepakatan yang mempermudah akses pasar bagi UKM dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak.
5. **Kerja Sama Multilateral dalam Forum Seperti WTO:**
- Memperkuat kerja sama di forum multilateral seperti WTO untuk fokus pada pengurangan hambatan nontarif, seperti kuota, peraturan teknis, atau prosedur yang membatasi akses pasar. Kerja sama antar negara diperlukan untuk menyusun aturan yang adil bagi negara maju dan berkembang.
 - Meningkatkan implementasi kesepakatan yang mendukung perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
6. **Pengurangan Praktik Proteksionis:**
- Mengurangi praktik proteksionisme yang sering disamakan dalam bentuk kuota impor, subsidi domestik, atau prosedur administratif yang memberatkan produk impor. Praktik ini memperburuk ketidaksetaraan dalam perdagangan global dan merugikan negara-negara yang bergantung pada ekspor.
7. **Peningkatan Akses terhadap Teknologi dan Inovasi:**
- Memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi ke negara berkembang untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global, misalnya dalam industri hijau atau teknologi berkelanjutan.
 - Negara maju dapat mengurangi pembatasan transfer teknologi ke negara berkembang dan membantu menciptakan pasar yang lebih adil.
8. **Mendorong Penyelesaian Sengketa yang Adil:**
- Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efisien di tingkat internasional, sehingga negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekuatan ekonomi secara tidak adil.

Intinya: Solusi untuk perdagangan nontarif yang adil dan berkelanjutan melibatkan kombinasi peningkatan standar, transparansi regulasi, dukungan bagi UKM, kerja sama multilateral, pengurangan proteksionisme, transfer teknologi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan menerapkan pendekatan ini, perdagangan internasional dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi semua negara, terutama negara berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan perdagangan nontarif merupakan isu penting dalam sistem perdagangan global saat ini. Walaupun bertujuan baik, seperti melindungi konsumen dan lingkungan, implementasinya seringkali justru menghambat kelancaran perdagangan dan menyebabkan distorsi pasar. Oleh karena itu, diperlukan tindakan bersama melalui harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, dan penguatan kerja sama antar negara untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Perdagangan nontarif telah menjadi salah satu kendala utama dalam perdagangan internasional modern. Meskipun kebijakan ini terkadang diperlukan untuk melindungi kepentingan dalam negeri, dampaknya terhadap perdagangan global sangat signifikan. Perdagangan nontarif menyebabkan peningkatan biaya, ketidakseimbangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan usaha kolektif di tingkat global, mulai dari penyelarasan standar hingga peningkatan transparansi. Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi internasional yang kuat, perdagangan dunia dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah hendaknya memprioritaskan kebijakan yang meningkatkan daya saing industri dalam negeri, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas. Artinya, kebijakan yang diambil harus mendukung pertumbuhan industri domestik tanpa melanggar aturan perdagangan internasional atau menciptakan distorsi pasar yang merugikan. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara proteksi yang wajar dan keterbukaan terhadap persaingan global. Dan bagi pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standar internasional. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi produk dan proses, serta investasi dalam teknologi yang lebih modern dan efisien. Dengan memenuhi standar internasional, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar global dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION (2021) : Kebijakan Non-Tarif dan Kontribusinya Pada Pengurangan Angka Kemiskinan
- ANGELLA FAITH MONTFAUCON, JANA SILBERRING, CSILLA LAKATOS, MASSIMILIANO CALÌ, BAYU AGNIMARUTO (2023) : Menggunakan database terbaru dari Bank Dunia tentang hambatan non-tarif untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti di Indonesia.
- Dahar, Darmiati. 2014. Analisis Dampak Kebijakan Non Tarif Terhadap Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-Negara Asean +3 [Tesis]. Bogor: Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dahar, Darmiati, Rina O, Wiwiek R. 2014. Analisis Pemberlakuan Non Tariff Measures (NTM) Pada Ekspor Hortikultura Indonesia ke ASEAN+3 [Jurnal]. Bandung: Bina Ekonomi 18(1): 98-116.